

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH UTARA KOTA MEDAN

Kornel Munthe¹, Antonius M Purba², Poltak T Parhusip³, Betniar Purba⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas

Email: kornel_munthe@yahoo.com¹, purba.antoniusm@gmail.com², ikoparhusip17@gmail.com³
betniar_purba@ust.ac.id

Kata Kunci : Abstrak

Strategi,
Percepatan
Pembangunan
dan
Wilayah Utara

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Fokus utama pembangunan daerah terletak pada kebijakan yang mengakar pada karakteristik khusus daerah, dan mendorong inisiatif dari tingkat lokal. Strategi tersebut melibatkan pengembangan fisik/lokalisasi, dunia bisnis, masyarakat, dan sumber daya manusia. Koordinasi antara strategi ini membentuk ekosistem pembangunan yang kuat, meningkatkan daya tarik lingkungan, menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberdayakan masyarakat, meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menciptakan tata kelola kelembagaan yang baik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan strategi ini tergantung pada perencanaan yang matang dan keterlibatan aktif masyarakat, memotivasi, inovasi, serta beradaptasi dengan dinamika perubahan untuk menciptakan fondasi yang tangguh bagi masa depan yang lebih baik di Wilayah Utara Kota Medan.

PENDAHULUAN

Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem tersebut relevan dengan sistem desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah diharapkan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai pengantar dalam memasuki dan memahami perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis, karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap berdasarkan adanya data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. Selanjutnya ketercapaian sasaran dan ketersediaan data menjadi ukuran utama yang sangat penting.

Sedangkan perencanaan itu sendiri merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan (*Planning*) adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh. Perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh perlu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat lebih terarah. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek oprasional. Proses perencanaan juga melibatkan

aspek perilaku yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

Selanjutnya pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan untuk generasi di masa mendatang dengan menitikberatkan pada daya dukung lingkungan, pencapaian keadilan sosial, berkelanjutan ekonomi dan lingkungan. Hal ini dipicu adanya peningkatan kegiatan secara besar-besaran dalam aspek sosial dan ekonomi serta meningkatnya produksi, konsumsi dan gaya hidup manusia. Peningkatan ini menyebabkan efek negatif terhadap kelestarian lingkungan seperti pencemaran dan menurunnya jumlah sumber daya yang tidak dapat diperbarui secara drastis. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan adalah pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi merupakan suatu metode analisis yang menekankan pada hubungan antara manusia dan kegiatan lingkungannya, sehingga manusia dan berbagai kegiatannya selalu menjadi fokus analisis dalam keterkaitannya dengan lingkungan.

Konsep pembangunan berkelanjutan dirumuskan untuk mencegah atau mengurangi dampak pemekaran kota yang tidak terstruktur (*urban sprawl*) sehingga kota menjadi tidak efisien dan tidak efektif dalam melayani kehidupan di dalamnya. Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar utama yang saling berkesinambungan, di antaranya: (a) Pertumbuhan ekonomi, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan merestrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi; (b) Keberlanjutan sosial, yakni menjamin keadilan sosial dalam distribusi kekayaan dan pelayanan sosial; (c) Keberlanjutan lingkungan, yakni dengan menjaga lingkungan tempat tinggal agar nyaman dan aman melalui zero emission.

Keberhasilan dari pembangunan berkelanjutan tidak hanya di bergantung pada sektor ekonomi melainkan perlu adanya campur tangan dari pemegang kekuasaan, dalam hal ini pemerintah, guna mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan sehingga tercapai pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan berorientasi pada pengembangan Kota Hijau yang memiliki kualitas hidup baik dan kondisi lingkungan yang kondusif. Konsep pembangunan yang bertahan lama atau berkelanjutan pun diharapkan dapat memfasilitasi persoalan lingkungan yang terjadi. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan paradigma pembangunan yang berkaitan langsung dengan keseimbangan alam atau lingkungan.

Berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956, Kota Medan ditetapkan sebagai daerah otonom dengan status kota metropolitan karena berbagai alasan dan latar belakang, termasuk politis, filosofis, teknis, sosial, geografis, demografis, dan psikologis. Tujuan pembangunan kota ini adalah untuk meningkatkan kualitas di berbagai bidang, terutama perdagangan, keuangan, dan industri. Tujuan akhir dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan produksi, keuntungan, dan kesejahteraan warga kota. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, pemerintah Kota Medan memiliki tugas dan tanggung jawab penting sebagai pengusaha, koordinator, fasilitator, dan stimulator. Tujuannya adalah untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam pembangunan kota. Dalam jangka menengah, Kota Medan akan dibangun dalam upaya memperkuat daya saing ekonomi, meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, serta mewujudkan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Konsep Medan BERTUAH, yang menjadi identitas pembangunan kota, mencerminkan sinergi antara nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip pembangunan modern, untuk menciptakan kesejahteraan yang merata, pertumbuhan ekonomi yang progresif, serta kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kota Medan.

Sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara dan kota terbesar ketiga di Indonesia, Medan berkembang dan berkembang pesat. Jumlah penduduk yang meningkat di kota ini menyebabkan peningkatan kebutuhan lahan, terutama untuk permukiman. Hal ini mengakibatkan ketersediaan lahan yang semakin terbatas setiap tahunnya. Dampaknya terhadap pola dan arah perkembangan daerah belum dipelajari secara menyeluruh (Sipayung et al., 2020).

Medan terletak antara 3°.27'-3°.47' Lintang Utara dan 98°.35'- 98°.44' Bujur Timur dengan ketinggian 2,5–92 meter di atas permukaan laut. Kota Medan secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sisi Barat, Timur, dan Selatan. Di sisi Utara, kota ini langsung berbatasan dengan Selat Malaka, jalur transportasi paling sibuk di dunia. Area administrasi Kota Medan terdiri dari Selat Malaka di sebelah Utara, Deli Tua dan Pancur Batu di sebelah Selatan, Sunggal di sebelah Barat,

dan Percut di sebelah Timur. Area administrasi Kota Medan mencapai 281.99 km², yang dibagi menjadi 21 kecamatan dengan 151 kelurahan dan 2.000 lingkungan. Kecamatan Medan Labuhan memiliki wilayah terbesar, dengan 35.09 km², yang merupakan 12.44% dari total wilayah Kota Medan. Kecamatan Medan Belawan memiliki wilayah kedua terbesar, dengan sekitar 33.27 km². Di sisi lain, Kecamatan Medan Maimun memiliki wilayah terkecil, hanya mencapai 3.02 km² (1,07% dari total luas keseluruhan).

Perkembangan pesat Kota Medan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara secara simultan memunculkan sejumlah masalah perkotaan khususnya di Wilayah Utara Kota Medan yang harus diselesaikan oleh Wali Kota/ Wakil Wali Kota terpilih, berkolaborasi dengan seluruh lapisan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait. Adapun rincian masalah berdasarkan informasi yang tersedia diantaranya: (1) Infrastruktur yang Terbatas: Keterbatasan dan ketimpangan dalam penyediaan fasilitas infrastruktur, seperti akses jalan, drainase (menyebabkan banjir rob), dan sarana pendidikan, merupakan salah satu faktor utama yang dirasakan langsung oleh Masyarakat, (2) Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Wilayah ini ditandai dengan struktur sosial yang majemuk, tingkat urbanisasi tinggi, dan kondisi sosial ekonomi yang rapuh, di mana pertumbuhan ekonomi belum dinikmati secara merata oleh semua lapisan masyarakat, sehingga memperlebar kesenjangan, (3) Perencanaan Pembangunan yang Belum Terintegrasi: Pembangunan di kawasan ini sering kali terhambat karena kurangnya perencanaan yang terintegrasi secara holistik antar program daerah, meskipun wacana pembangunan prioritas sudah ada sejak lama; (4) Permasalahan Lingkungan Hidup: Isu spesifik seperti pengelolaan sampah (*illegal dumping*) juga menjadi masalah penting secara umum, yang berdampak pada kualitas lingkungan di wilayah Utara; (5) Keterbatasan Partisipasi Masyarakat: Kurangnya keterlibatan masyarakat dan koordinasi yang tidak efektif antara pemerintah dan sektor swasta juga menjadi penghambat dalam proses pembangunan daerah; (6) Banjir Rob: Masalah lingkungan seperti banjir rob juga menjadi tantangan signifikan di wilayah Utara Kota Medan, yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan menghambat aktivitas ekonomi; (7) Akses Layanan Dasar: Meskipun tidak spesifik untuk Medan Utara, daerah tertinggal umumnya menghadapi masalah akses pendidikan dan kesehatan yang rendah, serta masalah stunting

Selanjutnya dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2025-2029, misi pembangunan kota yang tercantum pada Misi ke 2 yakni Misi Energik. Misi Energik Kota Medan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur kewilayahan, sarana, dan prasarana yang merata serta berkeadilan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam rangka mewujudkan misi ini, pemerintah daerah menetapkan berbagai target kinerja yang terintegrasi dan saling mendukung. Salah satu prioritasnya adalah pembenahan dan peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta olahraga, yang bertujuan untuk memastikan akses yang setara bagi seluruh warga kota, tanpa terkecuali, termasuk di wilayah pinggiran yakni Wilayah Medan Utara.

Dalam aspek mobilitas dan konektivitas, misi ini diwujudkan melalui pembangunan transportasi umum yang terintegrasi dan aman, yang mendukung mobilitas harian warga serta memperkuat keterhubungan antar wilayah. Tak hanya itu, penataan infrastruktur dilakukan secara berbasis kebutuhan dan berkelanjutan, termasuk dalam modernisasi pasar tradisional agar tetap relevan dengan perkembangan zaman namun tidak kehilangan jati diri lokalnya. Misi ini juga mencakup pembangunan fasilitas umum yang ramah bagi difabel dan disabilitas, serta ruang publik yang ramah anak, sebagai bagian dari komitmen membangun kota yang inklusif dan manusiawi. Dengan demikian, peningkatan fasilitas di berbagai bidang menjadi pilar utama dari Misi Energik, untuk menciptakan Kota Medan yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga adil dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mewujudkan misi Energik Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota membutuhkan perencanaan pembangunan daerah yang mampu mengintegrasikan kondisi dan potensi yang dimiliki di Wilayah Medan Utara Kota Medan sesuai dengan dinamika perkembangan daerah. Oleh karena itu upaya pembangunan ekonomi di segala bidang secara terintegrasi perlu disusun melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kota terpadu, atas dasar itulah dilakukan kajian tentang strategi percepatan pembangunan di Wilayah Utara Kota Medan.



Gambar 1. Logo Pemko Medan

DASAR TEORI

1. Konsep Pembangunan

Pembangunan adalah hasil dari program dan kegiatan Pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan social, tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus menerus dan melibatkan semua sumber daya untuk dimanfaatkan sebagai alat untuk menjalankan terlaksananya sebuah konsep dengan menggunakan kemampuan dan teknologi yang ada tentu dengan melihat adanya masalah yang dihadapi masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan dalam kehidupan masyarakat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat pada sebuah kehidupan negara dan bermasyarakat. Salah satu cara Pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yaitu melakukan pembangunan sarana dan prasarana fisik disamping meningkatkan sumber daya manusia.

Tujuan utama dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beragam usaha dari berbagai sector terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Namun demikian, seringkali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat di kelurahan/pedesaan. Disamping itu banyak terjadi kerusakan lingkungan karena pendayagunaan yang berlebihan dalam mengejar target pembangunan tertentu dan juga terjadi pelanggaran norma-norma kehidupan masyarakat di kelurahan/pedesaan.

Agar pembangunan dapat berhasil, maka diperlukan dukungan, perhatian dan partisipasi masyarakat dalam segala hal. Dalam hal ini tidak terkecuali masyarakat kelurahan/pedesaan. Pembangunan berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan warga kelurahan/desa, misalnya pembangunan jalan dan gorong-gorong. Pembangunan yang dampaknya tidak langsung seperti pembangunan masjid dan pengadaan pondok pasantren, memang tidak secara langsung dampak tersebut terlihat. Pada pembangunan masjid masyarakat bisa shalat berjamaah dan anak-anak bisa mengaji di masjid tersebut, kemudian pada pengadaan komputer membawa peningkatan wawasan warga kelurahan/desa dan anak-anak didik, karena dampaknya akan terlihat kemudian ketika mereka sudah besar dan dewasa. Anak-anak yang terdidik akan bisa lebih sejahtera dari anak-anak yang tidak terdidik

2. Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang kompleks dan multidimensional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Menurut *Todaro dan Smith* (2015), pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sosial, lingkungan, dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah harus memperhatikan berbagai dimensi yang saling berhubungan.

Dalam konteks Indonesia, pembangunan daerah sering kali dihadapkan pada tantangan ketimpangan antar daerah, di mana beberapa daerah berkembang pesat sementara yang lain tertinggal. *Bappenas* (2020) mengungkapkan bahwa disparitas pembangunan ini memerlukan perhatian khusus agar semua daerah dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, pembangunan daerah harus

dirancang secara holistik, mempertimbangkan kondisi lokal dan potensi yang ada. Definisi pembangunan daerah juga mencakup upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada. *Soedjatmiko* (2017) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga mampu menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat.

Secara umum, pembangunan daerah dapat diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut *Rahardjo* (2019), pendekatan berbasis potensi local sangat penting dalam pembangunan daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik dan kekayaan sumber daya yang berbeda, sehingga pengembangan sektor unggulan yang sesuai dengan potensi lokal dapat meningkatkan daya saing daerah.

Dalam konteks global, pembangunan yang berkelanjutan menjadi salah satu prinsip utama dalam pembangunan daerah. *Brundtland Report* (1987) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah harus dirancang untuk mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan daerah juga harus mempertimbangkan regulasi dan kebijakan nasional yang berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pelaksanaan otonomi daerah, yang memungkinkan daerah untuk mengelola sumber dayanya secara mandiri. Hal ini diharapkan dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam pembangunan daerah.

Dalam proses pembangunan daerah, perencanaan yang baik menjadi sangat penting. Menurut *Puspitasari* (2015), system perencanaan yang terintegrasi dan berbasis data dapat membantu dalam menentukan prioritas pembangunan yang tepat. Di samping itu, evaluasi yang sistematis terhadap kebijakan dan program pembangunan juga diperlukan untuk memastikan efektivitas dan relevansinya.

Definisi pembangunan daerah juga mencakup upaya untuk mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks. Ketidakmerataan akses terhadap sumber daya, infrastruktur, dan layanan publik menjadi tantangan utama yang harus dihadapi dalam pembangunan daerah. *Jamaluddin et al.* (2018) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa yang efektif dapat berkontribusi pada perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Akhirnya, pembangunan daerah harus dilihat sebagai suatu proses yang berkelanjutan, melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Menurut *Garis* (2017), kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, definisi pembangunan daerah harus mencerminkan kompleksitas dan dinamika yang ada dalam konteks local

3. Strategi Pemebangunan Daerah

a. Strategi Pembangunan Infrastruktur



Pembangunan infrastruktur diawali dari sebuah gagasan, dimana memiliki maksud dan tujuan yang harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Keberhasilan sebuah pembangunan infrastruktur dapat diukur dari sejauh mana pemanfaatan dan dampaknya terhadap dinamika pembangunan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan. Hubungan fungsi antara infrastruktur yang tersedia sangat menentukan tingkat kemanfaatannya. Infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Dengan meningkatkan konektivitas, akses layanan dasar, dan mengurangi ketimpangan, pembangunan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan dan melaksanakan proyek infrastruktur dengan baik dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Kebijakan pembangunan infrastruktur yang baik harus memperhatikan berbagai aspek, termasuk perencanaan yang terintegrasi, partisipasi masyarakat, dan strategi pendanaan yang berkelanjutan. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan menerapkan rekomendasi yang tepat, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

b. Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan manusia dilakukan melalui pendekatan kapabilitas, yaitu memperluas kerangka pandang terhadap kesejahteraan, karena manusia tidak dipandang sekadar instrument kemajuan. Dalam paradigma pembangunan manusia, faktor-faktor selain ekonomi, seperti faktor politik, faktor budaya, dan faktor-faktor sosial perlu diperhatikan. Pendekatan ini menghargai keberagaman nilai, dimana pencapaian kapabilitas dapat berbeda kualitas maupun kuantitasnya pada orang berlainan. Pendekatan tersebut berkonsentrasi pada dua hal berlainan, yaitu aspek proses dan aspek kesempatan. Pada aspek pertama, pelaku pembangunan terlibat dalam pengambilan putusan dan pada aspek kedua, pelaku juga memiliki peluang untuk mewujudkan tujuan yang bernilai dan berterima. Dengan itu, analisis ekonomi turut bergeser; mulanya memandang akumulasi kapital terutama dalam kerangka pendapatan dan aspek-aspek fisik lainnya kemudian berubah melalui integrasi aspek-aspek tersebut dengan proses untuk menghasilkan kualitas produktif dalam makna lebih utuh manusia

c. Strategi Pembangunan Ekonomi.



Strategi pembangunan sektor unggulan adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengoptimalkan potensi sektor-sektor yang memiliki keunggulan di suatu daerah. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan sektor unggulan memerlukan langkah-langkah strategis berkaitan dengan hal-hal berikut: (1) Komponen Strategi Pembangunan Sektor Unggulan, (2) Pendapat Ahli; (3) Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan; (4) Perencanaan yang Matang; (5) Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat; (6) Partisipasi Masyarakat; (7) Regulasi

dan Pengawasan; (8) Diversifikasi Produk Wisata. Melalui penerapan strategi-strategi dimaksud, pengembangan sektor ekonomi dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

d. Strategi Pembangunan Kelembagaan

Strategi perencanaan pembangunan bidang kelembagaan dan tata laksana yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil dibutuhkan untuk memastikan setiap kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi dan berdampak pada masyarakat. Penguatan di bidang tata laksana meliputi kebijakan pemetaan kelembagaan dan peningkatan tata kelola instansi pemerintah, penguatan proses bisnis instansi pemerintah, termasuk proses bisnis tematik untuk mendukung pencapaian program prioritas sebagai *shared outcomes*. Di sisi lain, terdapat tantangan dari aspek penajaman sasaran, penyesuaian regulasi, hingga optimalisasi penggunaan sumber daya. Selain itu, kondisi *refocusing*, penyesuaian anggaran, dan tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menuntut penyusunan rencana kerja yang lebih inovatif dan tepat sasaran. Dalam implementasi tata kelola pemerintahan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, pengelolaan sumber daya yang baik, pembangunan kapasitas sumber daya manusia, dan kerjasama antar pemerintah adalah komponen yang penting. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah lebih dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang mereka laksanakan berdampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terkait untuk bekerja sama dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

e. Strategi Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat



Kepedulian masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dirasakan belum maksimal karena masih kurangnya rasa kepedulian warga dan rasa empati terhadap orang lain serta tidak aktif dalam kegiatan guna meningkatkan keamanan lingkungan. Warga yang digolongkan aktif di lingkungan adalah pemuda-pemuda dimana pemuda-pemuda ini lah yang selalu ronda malam untuk menjaga keamanan lingkungan. Faktor yang menyebabkan masyarakat kurang peduli terhadap lingkungan adalah usia, pendidikan, pekerjaan, dan lamanya tinggal. Usia yang dapat ikut serta dalam keamanan adalah yang tergolong dewasa dan yang masih memiliki fisik yang sehat

Upaya yang dilakukan pemimpin masyarakat untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan antara lain pemimpin kelurahan/desa sudah berusaha dalam meningkatkan kepedulian warga terhadap kepedulian dan keamanan lingkungan dengan mengadakan siskamling, memberikan penerangan jalan yang cukup baik agar masyarakat lebih nyaman dan yang ronda malam lebih aman, serta sosialisasi kepada warga agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan di mulai dari rumah masing-masing terlebih dahulu.

f. Strategi Pembangunan Partisipasi Masyarakat.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam kajian ini diklasifikasikan berdasarkan jenis dan sumbernya untuk memastikan bahwa data yang digunakan relevan akurat dan sesuai dengan kebutuhan analisis deskriptif kuantitatif

a. Jenis dan Sumber Data Primer

Data Primer yang dikumpul dari metode interview atau wawancara dari informan yang dapatkan langsung dengan komunikasi dengan informan. Sumber informan pada penelitian ini adalah beberapa Tokoh Masyarakat, pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan, Masyarakat Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Belawalan, Kecamatan Medan Marelan dan Kecamatan Medan Deli.

b. Jenis dan Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel, serta informasi dari situs resmi BPS yakni Kota Medan dalam angka Tahun 2025, Kecamatan Medan Marelan dalam angka Tahun 2025, Kecamatan Medan Belawan dalam Angka tahun 2025, Kecamatan Medan Labuhan dalam Angka Tahun 2025 dan Kecamatan Medan Deli dalam Angka Tahun 2025 seta dokumen lainnya secara langsung dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan.

3. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini Adalah menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen- dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data kajian ini. Metode dokumentasi digunakan untuk mengupulkan data: Kota Medan dalam angka Tahun 2025, Kecamatan Medan Marelan dalam angka Tahun 2025, Kecamatan Medan Belawan dalam Angka tahun 2025, Kecamatan Medan Labuhan dalam Angka Tahun 2025 dan Kecamatan Medan Deli dalam Angka Tahun 2025 seta dokumen lainnya secara langsung dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan.

b. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden. Dalam kajian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Instrumen yang digunakan peneliti adalah observasi nonpartisipan tidak terstruktur. Observasi digunakan untuk mengamati kondisi infrastruktur, keamanan, kondisi ekonomi di Wilayah Utara Kota Medan

c. Wawancara

Wawancara dalam penelitian terjadi dimana peneliti sedang berbincang- bincang dengan narasumber dengan tujuan menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dan menggunakan teknik tertentu. "Wawancara Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dua orang, pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban. Dalam kajian ini subjek wawancara Adalah Tokoh Masyarakat, pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan, Masyarakat Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Belawalan, Kecamatan Medan Marelan dan Kecamatan Medan Deli

4. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan sebagian besar merupakan data kualitatif dan teknik analisis dengan menggunakan teknik kualitatif. Teknik ini dipilih peneliti untuk menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik. Dalam penggunaan analisis kualitatif, maka pengintepretasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis. Analisis kualitatif yang digunakan Adalah model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan

KESIMPULAN

- a. Strategi pembangunan Sumber Daya Manusia perlu memfokuskan pada peningkatan kualitas tenaga kerja lokal yang selaras dengan potensi ekonomi kawasan tersebut, seperti industri dan sektor maritim/pesisir.
 - 1) Pelatihan Berbasis Kebutuhan Industri: Mengadakan program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan permintaan sektor utama, seperti:
 - 2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan, mengatasi faktor-faktor seperti putus sekolah di daerah pesisir melalui:
 - 3) Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Gizi, kesehatan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan SDM yang berkualitas.
 - 4) Kolaborasi Multi - Pihak, strategi ini memerlukan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan:
- b. Strategi pembangunan infrastruktur di Wilayah Utara Kota Medan, yang merupakan pusat logistik dan perdagangan utama diantaranya adalah
 - 1) Perwujudan kawasan strategis kota meliputi: pembentukan *green belt* sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem pada KSK Kawasan Utara Kota Medan;
 - 2) Perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri atas :
 - a. Pembangunan Jalan Lingkar Utara;
 - b. Pembangunan Jalan Lingkar Pantai Utara (Jalan Susur Pantai);
 - c. Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Jalan Rawe;
 - d. Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Jalan Seruai;
 - e. Pembangunan Jalan Bypass Siombak (Marelan – Sicanang);
 - f. Peningkatan jalan penghubung Jalan Marelan Raya – Jl. Yos Sudarso;
 - g. Pembangunan Terminal Tipe B Marelan;
 - h. Pembangunan Terminal Barang di Kawasan Industri Medan (KIM);
 - i. Pembangunan Terminal Barang di Kawasan Industri Lamhotma
 - j. Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api Belawan;
 - k. Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api Labuhan;
 - l. Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api Titi Papan;
 - m. Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api Mabar;
 - n. Reklamasi dan Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional;
 - o. Pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi penyeberangan Pelabuhan Belawan;
 - p. Pengembangan dan peningkatan pelabuhan khusus LANAL dan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan serta pelabuhan khusus lainnya; dan
 - 3) Perwujudan *sistem penyediaan air minum* (SPAM), terdiri atas:
 - 4) Perwujudan *sistem jaringan drainase*, terdiri atas:
 - 5) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH): Fokus pada pengembangan RTH untuk menata kota menjadi lebih ramah lingkungan, yang juga dapat membantu dalam penyerapan air dan mengurangi polusi udara.
- b. Pengembangan sektor unggulan merupakan salah satu strategi penting dalam kebijakan pembangunan di Wilayah Utara Kota Medan.
 - 1) Optimalisasi Sektor Ekonomi Unggulan, wilayah utara Medan memiliki potensi besar di sektor industri, perdagangan, dan perikanan.
 - 2) Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan UMKM, strategi ini bertujuan untuk memastikan pembangunan
 - 3) Menarik Investasi
- c. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa pemerintahan suatu negara/daerah dapat berjalan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
 - 1) Digitalisasi Pelayanan Publik (*E-Government*)
Penerapan sistem informasi yang terintegrasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi birokrasi.
 - 2) Peningkatan Profesionalisme dan Integritas ASN

Kualitas sumber daya manusia di pemerintahan daerah merupakan kunci implementasi *good governance*.

3) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas membangun kepercayaan publik dan memastikan penggunaan sumber daya yang optimal.

4) Partisipasi Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan memastikan kebijakan yang dibuat relevan dengan kebutuhan lokal.

- Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Inklusif: Memastikan partisipasi aktif tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD).
- Forum Konsultasi Publik: Membentuk forum reguler, baik daring maupun luring, untuk menampung masukan dan umpan balik dari warga mengenai pelayanan publik dan program pemerintah di wilayah utara

d. Strategi Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Kepedulian masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dirasakan belum maksimal karena masih kurangnya rasa kepedulian warga dan rasa empati terhadap orang lain serta tidak aktif dalam kegiatan guna meningkatkan keamanan lingkungan.

1) Peningkatan Kemitraan Polisi dan Masyarakat.

2) Penanggulangan Kriminalitas Spesifik

3) Pemanfaatan Teknologi dan Infrastruktur

- Pemasangan CCTV: Mendorong pemasangan CCTV di titik-titik rawan, terutama di area publik dan perbatasan lingkungan yang sering menjadi lokasi tawuran atau kejahatan, dan mengintegrasikannya dengan pusat kendali pihak kepolisian atau Pemko Medan.

4) Peningkatan Partisipasi Masyarakat

- Mengaktifkan Kembali Siskamling/Ronda: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ronda atau patroli lingkungan (Siskamling) sebagai upaya preventif menjaga keamanan lokal.
- Pembinaan Generasi Muda: Melakukan pembinaan terhadap organisasi anak-anak dan remaja agar terarah kepada hal-hal positif dan menjauhkannya dari pengaruh negatif seperti narkoba.
- Sosialisasi dan Penyuluhan: Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas dan melaporkan potensi gangguan keamanan kepada pihak berwenang

e. Strategi Pembangunan Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan ukuran keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

1) Penguatan Forum Komunikasi dan Perencanaan:

- Revitalisasi Musrenbang: Jadikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) lebih efektif dengan melibatkan warga sejak awal, mengidentifikasi prioritas, dan memastikan rencana selaras dengan visi misi Wali Kota dan program nasional (pengembangan SDM).
- Bentuk Forum Warga Khusus: Adakan forum rutin (Kelompok Diskusi Terpumpun/FGD) di tingkat kelurahan/kecamatan untuk membahas isu spesifik (infrastruktur, sosial, ekonomi) di Medan Utara.

2) Peningkatan Kapasitas dan Informasi:

- Edukasi Partisipasi: Berikan seminar/pelatihan tentang pentingnya peran warga dalam pembangunan, cara menyampaikan aspirasi, dan mekanisme pengawasan.
- Pemanfaatan Media Digital: Gunakan WhatsApp, Instagram, dan Facebook untuk sosialisasi program, update progres, dan menerima masukan secara cepat (sistem informasi publik).

3) Fasilitasi Kontribusi Beragam:

- Gotong Royong Terstruktur: Libatkan warga dalam kerja bakti, perbaikan fasilitas umum (jalan, drainase) dengan skema yang jelas dan apresiasi.

- Dana Swadaya dan Donasi: Dorong partisipasi harta/tenaga dalam skala kecil, lalu pemerintah daerah/pusat memberikan dukungan sebagai *multiplier effect*.
- 4) Mendorong Peran Organisasi dan Tokoh Masyarakat:
 - Libatkan Ormas dan Tokoh Agama/Adat: Manfaatkan jaringan mereka untuk menyebarkan informasi dan menggerakkan partisipasi warga di level akar rumput.
 - Bentuk Tim Pengawas Warga: Libatkan warga dalam monitoring dan evaluasi proyek pembangunan untuk memastikan kualitas dan transparansi.
- 5) Fokus pada Kebutuhan Lokal & Berkelanjutan:
 - Pendekatan Sesuai Karakter Medan Utara: Program harus menyentuh isu spesifik wilayah (misal: penanganan banjir, pemberdayaan nelayan/petani jika ada), bukan hanya program umum.
 - Evaluasi Berkelanjutan: Pantau dampak program dan sesuaikan strategi agar pembangunan berdampak jangka panjang bagi kualitas hidup warga.

DAFTAR PUSTAKA

- (2020). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) (2020)
- Adisasmita, Rahardjo. 2019. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Brundtland, G.H., editor. 1987. *Report of The World Commission on Environment and Development, The United Nation*.
- Garis, R.R (2017), *Analisis Implementasi 4 Program Prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Di Kabupaten Ciamis*, Jurnal Unigal, Hal:108-130
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., & Rusli, B. (2018). *Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah*. Ilmu Pemerintahan”
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Puspitasari, M. E. (2015). *Analisis Kebijakan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal*. Jurnal Dimensi.
- Putra, G. A. K., & Saptutyningih, E. (2017). "Analisis Sektor Ekonomi Potensial dan Unggulan dalam Penentuan Kebijakan Pembangunan Daerah." Journal of Economics Research.
- Soedjatmiko, S. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (Edisi ke 9). Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [12] Kota Medan dalam Angka Tahun 2025